

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kesejahteraan Sosial**

##### 2.1.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (2013:45) dapat diartikan sebagai persamaan makna dengan harkat dan martabat manusia yang direpresentasikan melalui beberapa indikasi antara lain: a. Keamanan, b. Kesejahteraan, c. Kebebasan, dan d. Identitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kesejahteraan sosial sebagai sebuah kondisi yang meliputi rasa aman, keselamatan, ketenteraman, dan kesejahteraan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1, kesejahteraan sosial ialah sebuah keadaan tercukupinya segala keperluan bersifat material, spiritual hingga sosial warga negara yang mana mampu menjadikan mereka supaya hidup dengan lebih layak, memberikan pengembangan terhadap diri sendiri, hingga melakukan segala fungsi sosial yang diterapkan pada kehidupan mereka (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

Kesejahteraan sosial mempunyai berbagai sudut pandang, antara lain: a) sebagai suatu kegiatan atau sistem yang terorganisasi, b) sebagai kondisi kesejahteraan, dan c) sebagai disiplin ilmu (Setiawan, 2017). Secara umum kesejahteraan sosial mencerminkan masyarakat yang mencapai kesejahteraan karena terpenuhinya kebutuhan material dan spiritualnya (Hardiyati et al., 2023).

Kesejahteraan sosial merujuk pada segala upaya manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik atau sejahtera. Konsep ini tidak dapat dipisahkan dari

manusia sebagai objek material, yang berperan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dengan demikian, kesejahteraan sosial berkaitan dengan kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya (Hardiyati et al., 2023).

Menurut Zastrow (2017), menyatakan apabila kesejahteraan sosial mempunyai beberapa definisi, antara lain sebagai kelembagaan atau agensi serta sebagai aspek keilmuan dan wawasan pengetahuan. Berkaitan pada beragam definisi tersebut, mampu ditarik simpulan apabila kesejahteraan sosial mempunyai definisi yang sangat beragam berkaitan pada perspektif yang difungsikan

James Midgley (2005:5) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai keadaan yang wajib dipenuhi, antara lain apabila permasalahan sosial dilakukan pengelolaan secara baik, keperluan akan mampu dipenuhi hingga kemungkinan sosial dapat dilakukan optimalisasi.

Proses pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan meraih ketahanan sosial melalui pengembangan hak asasi manusia, memberikan kesediaan mekanisme penyelesaian permasalahan sosial secara lebih efektif, mengadakan kesempatan agar mampu mencangkup kewajiban dan keikutsertaan pada aktivitas usaha kesejahteraan sosial (Hardiyati et al., 2023).

Kesejahteraan sosial mengacu pada semua inisiatif sosial terorganisasi yang bertujuan supaya memberikan peningkatan taraf kehidupan masyarakat sesuai konteks sosial mereka. Kesejahteraan sosial meliputi beragam komponen kebijakan dan pelayanan yang berkaitan dengan bidang kehidupan masyarakat, seperti penghasilan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, hingga sistem budaya (Gorahe, 2021).

### 2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial bertujuan memberikan bantuan pada individu, kelompok hingga masyarakat agar mampu mengembangkan fungsi kehidupan secara maksimal pada keseharian mereka (Az-Zahrah, 2018). Schneiderman menyatakan beragam pengertian tujuan kesejahteraan, antara lain: a) Upaya dalam melaksanakan kehidupan yang terjamin kesejahteraannya melalui pencapaian taraf kehidupan dasar misalnya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan hingga relasi sosial secara lebih harmonis terhadap lingkungan; b) Upaya mampu meraih penyesuaian diri secara optimal, secara spesifik dengan masyarakat pada lingkungan mereka serta; c) Upaya mampu memberikan pengembangan taraf hidup secara lebih memuaskan (Fahrudin, 2003).

Tujuan kesejahteraan sosial secara eksplisit dinyatakan sebagai pencapaian taraf hidup lebih sejahtera supaya mampu melakukan adaptasi lebih optimal. Kegiatan tujuan pokok sistem kesejahteraan sosial, antara lain melakukan pemeliharaan sistem yang mengaitkan proses pemeliharaan pada keseimbangan di antara penilaian, Konvensi hingga standardisasi atau taraf sosial.

Kedua, pemantauan sistem memerlukan pengawasan yang efektif pada tindakan yang tidak mampu dilakukan penerimaan pada ranah sosial. Ketiga, transformasi sistem memerlukan modifikasi untuk menciptakan sistem lebih efisien untuk para masyarakat Az-Zahrah, (2018) dalam (Hardiyati et al., 2023).

### 2.1.3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi agar dapat meminimalisir beragam penekanan yang muncul disebabkan adanya perubahan bidang sosial dan perekonomian. Fungsi ini bertujuan untuk mencegah dampak-dampak sosial negatif yang dapat terjadi akibat proses pembangunan, serta menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dikutip dalam (Haryanto, 2020), beragam fungsi antara lain:

#### 1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial berfungsi menguatkan antara individu, keluarga hingga masyarakat guna mencegah munculnya masalah sosial baru. Pada kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan, upaya pencegahan difokuskan pada kegiatan yang mendukung terciptanya pola interaksi sosial baru dan pembentukan lembaga sosial yang lebih tepat.

#### 2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial berfungsi mengatasi serta meminimalkan tantangan fisik, emosional, serta sosial individu agar mampu kembali berfungsi normal pada lingkungan masyarakat. Kesejahteraan sosial merujuk pada fungsi pemulihan atau rehabilitasi.

#### 3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi memberikan kontribusi, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung terhadap tahapan pengembangan hingga pembinaan susunan sumber daya sosial kehidupan masyarakat.

#### 4. Fungsi Penunjang (*Support*)

Kesejahteraan sosial merujuk pada aktivitas memberikan bantuan untuk meraih tujuan sektor serta aspek layanan kesejahteraan sosial lainnya.

##### 2.1.4. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial tersusun atas segala aktivitas yang disebut dengan Upaya Kesejahteraan Sosial (UKS). Pada ranah makro, UKS secara mendasar mengacu atas apa yang dikatakan sebagai proses pembangunan kesejahteraan sosial atau PKS. Berkaitan pada kajian Suharto (2010:4), pembangunan kesejahteraan sosial didefinisikan atas, *Segala upaya yang telah direncanakan serta mampu melembagakan yang tersusun atas beragam intervensi sosial hingga layanan sosial agar mampu mencukupi keperluan individu, melakukan pencegahan serta meminimalkan permasalahan sosial hingga menguatkan pada beragam institusi sosial.*

Definisi tersebut menyatakan proses membangun kesejahteraan sosial memiliki tujuan sebagai proses peningkatan mutu kehidupan masyarakat lebih holistik, yaitu :

1. Memberikan peningkatan atas kualitas hidup masyarakat dengan cara menyediakan pelayanan sosial serta penjaminan sosial untuk semua elemen masyarakat, terkhusus pada masyarakat menengah ke bawah yang sangat membutuhkan perlindungan sosial.

2. Memberikan peningkatan atas pemberdayaan dengan cara membentuk sistem serta kelembagaan pada ranah perekonomian, sosial hingga politik yang mengedepankan harkat martabat individu.
3. Memberikan peningkatan atas segala macam kebebasan dengan meluaskan aksesibilitas hingga pemilihan kesempatan berkaitan pada aspirasi, keterampilan hingga standarisasi kehidupan manusia.

Pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai beragam karakteristik secara keseluruhan, yang masing-masing layanan telah disediakan selalu memiliki pandangan apabila penerima manfaat sebagai individu atau kelompok yang tidak terikat pada konteks sistem sosial hingga kebudayaan yang berkembang dalam ruang lingkungannya. Target pembangunan kesejahteraan sosial terdiri dari semua komponen kemasyarakatan tanpa merujuk pada taraf sosial atau golongan masyarakat tertentu (Taufiqurakhman, 2022).

## **2.2. Pekerjaan Sosial**

### **2.2.1. Definisi Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial merupakan sebuah kajian yang hadir berdasarkan perkembangan pemahaman para filantropis yang memiliki peranan sebagai sukarelawan. Sebagai profesi yang memiliki tujuan pemberi bantuan, pekerjaan sosial merujuk pada kegunaan sosial individu ketika melaksanakan proses interaksi serta korelasi atas lingkungan sosial mereka. Penekanan tersebut merupakan kekhasan yang memberikan perbedaan atas pekerjaan sosial pada profesi pertolongan lain.

Pekerja sosial berperan mendorong terjadinya perubahan sosial, menyelesaikan masalah relasi antar manusia, serta memberdayakan dan membebaskan individu agar meraih mutu kehidupan lebih maksimal. Substansi tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan beragam teori tindakan manusia serta sistem sosial. Pekerjaan sosial melaksanakan sejumlah intervensi pada saat adanya komunikasi di antara individu dengan lingkungan sekelilingnya. Prinsip hak asasi manusia atau HAM serta keadilan sosial merupakan dasar pokok dalam pelaksanaan pekerjaan sosial.

Pengertian pekerjaan sosial dijelaskan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan pekerjaan sosial profesional sebagai seseorang yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta, memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pekerjaan sosial, serta peduli terhadap masalah sosial berdasarkan pada bidang pendidikan, pelatihan, hingga pengalaman praktik pekerjaan sosial, mampu melakukan sejumlah layanan serta penanganan permasalahan sosial. Pekerjaan sosial dapat ditarik simpulan sebagai cabang keilmuan yang terfokus dalam intervensi pada tahapan interaksi di antara individu dengan lingkungan sekitarnya, serta memfungsikan kajian tindakan manusia dan sistem sosial supaya mampu memberikan peningkatan taraf kehidupan masyarakat (Taufiqurakhman, 2022).

Pekerjaan sosial Hakim, (2014) sebagaimana dikutip dalam (Napsiyah, 2020) merupakan kegiatan profesionalisme yang memiliki tujuan memberikan bantuan pada seseorang, kelompok hingga masyarakat ketika memberikan peningkatan atau perbaikan atas keterampilan mereka mampu berfungsi secara

sosial hingga menghadirkan keadaan yang mendorong ketercapaian suatu tujuan. Sebagai profesi, pekerjaan sosial memerlukan penguasaan beragam wawasan dan keilmuan secara teoretis, keterampilan dalam mengimplementasikan kajian dengan cara menginterpretasikan suatu teori, hingga keterampilan secara spesifik yang didapatkan dengan cara pengalaman.

### 2.2.2. Tujuan Pekerjaan Sosial

Peran pekerjaan sosial memiliki variasi, berkaitan atas segala konteksnya. Dalam ranah general, pekerjaan sosial dapat berfungsi sebagai mediator, fasilitator atau pendamping, pembimbing, perencana, serta pemecah masalah. Pekerjaan sosial bertujuan sebagai penguatan fungsi sosial seseorang serta mampu memberikan peningkatan atas efektivitas kelembagaan masyarakat yang menghadirkan beragam sumber daya. Merujuk pada kajian NASW dalam Fahrudin (2014:66) yang mana dikutip pada (Taufiqurakhman, 2022), tujuan praktik pekerjaan sosial antara lain:

1. Memberikan peningkatan atas beragam keterampilan individu dapat pemecahan masalah, mengatasi (*coping*), serta perkembangan.
2. Mengorelasikan individu serta beragam sistem yang mampu memberikan sumber kepada mereka dengan cara memberikan segala kesempatan.
3. Memberikan perbaikan atas efektivitas hingga melaksanakan pekerjaan dengan lebih manusiawi berdasarkan pada sejumlah sistem yang memberikan ketersediaan individu berdasarkan pada segala sumber serta layanan.

4. Memberikan perkembangan serta perbaikan sejumlah kebijakan sosial.
5. Memberikan peningkatan atas kesejahteraan individu serta meminimalkan kemiskinan, segala bentuk penindasan, hingga beragam tindakan ketidakadilan sosial.
6. Memberikan pengusahaan atas segala ketetapan, layanan hingga berbagai sumber berdasarkan pada advokasi dan perilaku sosial hingga politik yang mampu memberikan peningkatan atas keadilan sosial hingga sistem perekonomian.
7. Memberikan pengembangan serta memfungsikan kajian, khazanah keilmuan hingga keterampilan yang dapat menghasilkan kemajuan pada praktik pekerjaan sosial.
8. Memberikan pengembangan serta mengimplementasikan praktik pada konteks kebudayaan yang beraneka ragam.

Berbagai tujuan tersebut merupakan misi pekerja sosial dalam melaksanakan praktik bantuan kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang menghadapi permasalahan, dengan upaya untuk menjaga serta meningkatkan fungsi sosial mereka (Taufiqurakhman, 2022).

### 2.2.3. Metode Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial pada praktiknya menerapkan metodologi atau teori mengenai perubahan sosial yang telah mengalami perencanaan. Metode Pekerjaan Sosial merupakan seperangkat tata cara kerja yang disusun serta dilaksanakan dengan sistematis yang difungsikan oleh para pekerja sosial supaya mampu menghadirkan

pelayanan sosial dengan lebih maksimal. Pada aspek pekerjaan sosial, muncul beragam metodologi yang telah ditetapkan supaya memberikan bantuan klien dalam mengatasi permasalahan yang mereka jalankan. Merujuk pada kajian Adi (2005: 141) dalam (Taufiqurakhman, 2022), berbagai metodologi yang difungsikan oleh pekerjaan sosial, yaitu:

1. *Social Casework* (Terapi Individu dan Keluarga)

Metode perubahan sosial yang direncanakan terhadap seseorang serta keluarga secara mendasar dikatakan sebagai upaya agar memberikan peningkatan fungsi sosial kelompok target yang mengalami permasalahan. Berkaitan pada kajian Skidmore, Thackeray, serta Farley dalam Adi (2005: 149), tahapan *casework* diuraikan menjadi beberapa proses, antara lain:

- a Tahap penelitian (*Engagement*). Tahapan ini klien memulai melaksanakan suatu jalinan hubungan dengan *caseworker*. Tahapan ini melaksanakan pengumpulan serta pemilahan data klien yang mampu dijadikan sebagai pegangan pada tahapan pertolongan.
- b Tahap pengkajian (Asesmen), berdasarkan pada kajian yang telah dilaksanakan diinginkan mampu melahirkan beragam bentuk terapi.
- c Tahap intervensi. Tahapan ini diawali dengan pertemuan awal dengan klien. Hal ini karena proses penelitian sudah dapat dikatakan sebagai treatment ketika proses ini telah memberikan bantuan kepada klien supaya mampu memberikan klarifikasi

atas segala masalahnya hingga berupaya melaksanakan segala bentuk perubahan keadaan pada hidup mereka.

- d Tahap terminasi. Tahapan ini sebagai proses yang mana hubungan di antara *caseworker* serta klien harus dilakukan pemberhentian.

Metode ini ditujukan untuk individu yang menghadapi masalah sosial dalam kehidupannya. Seorang pekerja sosial perlu menggali permasalahan yang dihadapi oleh individu dan memberikan pendekatan yang dapat mengembangkan serta menyelesaikan masalah.

## 2. *Social Group Work* (Bimbingan Sosial Kelompok)

Metode perubahan sosial yang terstruktur pada suatu kelompok dikatakan dengan metode *groupwork*. Bimbingan sosial kelompok merupakan layanan yang ditujukan kepada kelompok dengan tujuan utama untuk mendukung anggota kelompok dalam memberikan pengaruh akan fungsi sosial, perkembangan, atau perubahan pribadi mereka. Skidmore, Tharckeray, dan Farley dalam Adi (2005: 161) sebagaimana dikutip dalam (Taufiqurakhman, 2022) menyatakan bahwa *group work* adalah:

*A method of working with people in groups (two or more people) for the enhancement of social functioning and for the achievement of socially desirable goals. Group work is based on the knowledge of people's needs for each other and their interdependence. Groupwork is a method of reducing and for accomplishing socially desirable purposes*

Metode *group work* adalah pendekatan tersebut memiliki fokus terhadap proses penyembuhan, yang telah didesain supaya mampu meminimalkan hingga memberikan perbaikan pada disfungsi sosial. Metodologi *group work* bertujuan sebagai pembantuan pada seseorang dalam melakukan pembelajaran pada perilaku yang mampu difungsikan sebagai proses perbaikan serta menyelesaikan permasalahan yang tengah dijalankan.

### 3. Metode Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Community Organization and Community Development)

Metode dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah model intervensi yang bertujuan untuk melakukan perubahan pada masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pendapat Brokensha dan Hodge Adi (2005: 169 dalam (Taufiqurakhman, 2022), pengembangan masyarakat didefinisikan :

*A movement design to promote better living for the whole community with the active participation, and, if possible, on the initiative of the community. It includes the whole range of development activities in the district whether these are undertaken by government or unofficial bodies. Community development must make use of the cooperative movement and must be put into effect in the closest association with local government bodies.*

Pengertian yang dijelaskan menyatakan pengembangan masyarakat merupakan pengupayaan yang memiliki tujuan agar mampu memberikan

peningkatan atas mutu kehidupan semua kelompok dengan keikutsertaan secara aktif, yang apabila memungkinkan berasal pada inisiatif masyarakat tersebut. Proses pengembangan masyarakat harus dilakukan dengan cara menggerakkan kolaborasi serta berkaitan pada aktivitas pemerintah daerah yang relatif dekat. Metodologi yang dinyatakan sebelumnya merupakan metodologi pokok pada pekerjaan sosial yang ditambahkan dengan metodologi lain, misalnya aksi sosial, kajian sosial hingga layanan sosial sebagai salah satu metodologi yang ditetapkan.

### **2.3. Pemberdayaan Masyarakat**

#### **2.3.1. Konsep pemberdayaan masyarakat**

Pemberdayaan merupakan suatu upaya mengedepankan sistem pembangunan pada masyarakat secara lebih mandiri serta terjamin kesejahteraan mereka melalui penguasaan khazanah keilmuan, sikap, keterampilan, tindakan, kemampuan hingga kesadaran pada proses maksimalisasi potensi sumber daya yang telah disediakan dengan cara penetapan kebijakan, program, aktivitas hingga proses pendampingan yang telah disesuaikan melalui kebutuhan masyarakat.

Mengutip pada kajian (Suharto, 2021) pada karyanya yang bertajuk *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, pemberdayaan mengacu terhadap keterampilan individu, secara spesifik pada komunitas rentan dan lemah yang mana mereka mempunyai segenap kekuatan hingga kemampuan pada (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari

kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) memberikan jangkauan atas beragam sumber produktif yang dapat mereka jadikan sebagai peningkatan penghasilan hingga mendapatkan beragam barang hingga layanan yang mereka inginkan, serta (c) ikut serta pada tahapan pembangunan hingga segala keputusan yang dapat memberikan pengaruh kepada mereka.

Merujuk pada kajian lfe (1995:61-64) pada (Suharto, 2021) , pemberdayaan mengacu pada 2 definisi utama, antara lain kekuasaan hingga kelompok lemah. Kekuasaan memiliki definisi sebagai bukan sekadar pada kekuasaan politik secara sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien, antara lain:

1. Pemilihan individu hingga beragam kesempatan untuk hidup: keterampilan untuk menyusun segala keputusan tentang *lifestyle*, tempat tinggal hingga pekerjaan.
2. Pengertian mengenai kebutuhan: keterampilan dalam penentuan segala kebutuhan sejalan pada aspirasi serta harapan mereka.
3. Gagasan dan ide: keterampilan agar mampu memberikan pengekspresian serta pengungkapan ide pada sebuah forum dengan lebih terbuka dan bebas tanpa adanya suatu paksaan dari berbagai pihak.
4. Beragam kelembagaan: keterampilan dalam penjangkauan, penggunaan hingga pengaruh atas pranata masyarakat, misalnya pada kelembagaan kesejahteraan sosial, pendidikan hingga kesehatan.
5. Berbagai sumber: keterampilan dalam melakukan mobilitas terhadap sumber formal, informal hingga kemasyarakatan.

6. Kegiatan perekonomian: keterampilan dalam pemanfaatan hingga pengelolaan mekanisme produksi pada distribusi hingga pertukaran produk hingga layanan.
7. Reproduksi: keterampilan yang berhubungan pada tahapan kelahiran, memberikan perawatan terhadap anak yang dilahirkan, pendidikan hingga sosialisasi.

Pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang memanfaatkan beragam penilaian secara unggul yang ada di masyarakat untuk menghasilkan ide-ide baru dalam program pembangunan yang berfokus pada manusia, partisipasi aktif, pemberdayaan, dan keberlanjutan pembangunan.

Pemberdayaan adalah pendekatan utama dalam meningkatkan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga masyarakat dapat meraih manfaat ekonomi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Proses pendampingan berperan dalam mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada, termasuk sumber daya alam dan keunggulan kompetitif lokal, serta membuka peluang pasar dan akses ke sumber daya lainnya. Pemberdayaan masyarakat menjadi konsep utama dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip utama pemberdayaan masyarakat berfokus pada usaha dalam memberikan peningkatan pada keterampilan hingga proses kemandirian supaya mereka mampu menghadirkan peranan secara aktif pada proses pembangunan lingkungan mereka. Sektor ekonomi merupakan substansi yang sangat signifikan pada proses pemberdayaan masyarakat sebab perekonomian yang telah mengalami

perkembangan mampu memberikan peningkatan pada mutu kehidupan masyarakat hingga mampu membuka peluang agar meraih kesejahteraan hingga kemakmuran secara kolektif.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep dalam pembangunan ekonomi yang menggabungkan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Konsep ini menawarkan pendekatan baru dalam pembangunan yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*" Chambers, (1995) dalam (Pakpahan, 2024). Pendekatan *people centered* menekankan pentingnya komunikasi sebagai elemen utama dalam menyampaikan pesan pembangunan yang efektif kepada masyarakat.

Cara pemerintah melakukan komunikasi dalam pembangunan adalah dengan menginformasikan kebijakan pembangunan yang akan diterapkan kepada masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *people centered development* yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Marshal & Raynol, (2023) dalam (Pakpahan, 2024).

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah pendekatan pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk menerapkan paradigma pembangunan saat ini, yaitu pembangunan yang berfokus pada partisipasi aktif masyarakat.

Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu masyarakat lokal dalam merancang dan mengelola sumber daya yang

ada, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan dan kemandirian dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat sangat terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada terciptanya kondisi keberlanjutan dalam kemandirian warga melalui dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terus bergerak Januaris & Rejeki, (2023) sebagaimana dikutip dalam (Pakpahan, 2024).

### 2.3.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki definisi yang memberikan tempat kepada masyarakat sebagai substansi pokok pada tahapan pembangunan. Tahapan tersebut diawali dengan mengikutsertakan masyarakat supaya dapat ikut serta secara aktif. Pada kajian (Suharto, 2021), disebutkan apabila pemberdayaan bertujuan pada proses penguatan kekuasaan masyarakat, secara spesifik pada kelompok lemah yang mempunyai ketidakberdayaan, sebab adanya keadaan internal seperti tanggapan mereka pribadi serta disebabkan keadaan eksternal yakni penindasan yang dilakukan oleh susunan sosial yang kurang mengedepankan keadilan. Beragam komunitas yang mampu diklasifikasikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya, antara lain:

1. Kelompok lemah secara struktural, yang mana memiliki kelemahan dalam ranah kelas, jenis kelamin hingga suku dan etnik.

2. Kelompok lemah khusus, misalnya para lansia, anak-anak, remaja, penyandang kecacatan, LGBT hingga masyarakat yang mengalami marjinalisasi.
3. Kelompok lemah secara personal, yaitu kelompok individu yang melewati segenap permasalahan pribadi maupun masalah keluarga.

Berbagai kelompok akan menjalani suatu kondisi marjinal pada sebuah lingkungan masyarakat, misalnya pada masyarakat kelas sosial perekonomian yang cenderung lemah, kelompok minoritas etnik, perempuan, para lansia, hingga penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami ketidakberdayaan.

Kondisi hingga tingkah laku mereka yang mengalami perbedaan dari keumuman sering kali dilihat sebagai unsur *deviant* atau penyimpangan. Mereka kerap kali tidak dihargai hingga memiliki stigma sebagai orang yang malas, memiliki kelemahan yang dikarenakan oleh mereka sendiri. Justru ketidakberdayaan tersebut kerap kali menjadi akibat atas munculnya ketidakadilan hingga marjinalisasi pada beragam bidang kehidupan tertentu (Suharto, 2021). Beberapa aspek perbaikan dalam pemberdayaan yang dikutip dalam (Pakpahan, 2024) antara lain:

1. Pendidikan (*better education*)

Pemberdayaan terbentuk melalui pendidikan yang bermutu. Pendidikan sebaiknya tidak hanya berjalan satu arah, tetapi harus bersifat dua arah. Pendidikan juga tidak boleh menggurui, melainkan pendidik harus berperan sebagai fasilitator. Proses ini harus mengedepankan sikap saling menghargai dan didasarkan pada pengalaman, serta memiliki sifat yang praktis.

## 2. Aksesibilitas (*better accessibility*)

Aksesibilitas dapat dicapai melalui penyediaan fasilitas bangunan, jalan, sumber informasi, inovasi, dan lembaga pemasaran, yang akan menciptakan peluang bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

## 3. Tindakan (*better action*)

Pemberdayaan yang dilakukan dengan memperbaiki tindakan dapat dicapai melalui evaluasi dan pengawasan, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di masa depan menjadi lebih efektif.

## 4. Kelembagaan (*better institution*)

Perbaikan pada aspek kelembagaan mencakup kemampuan dalam berkomunikasi, penguatan jejaring kemitraan untuk mendorong perubahan perilaku yang selaras dengan nilai dan adat masyarakat, sehingga tujuan pemberdayaan dapat tercapai.

## 5. Usaha (*better business*)

Perbaikan usaha harus dilakukan secara berkelanjutan, baik dalam aspek layanan maupun produk. Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan kelembagaan dapat mendukung perbaikan usaha tersebut.

## 6. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Perbaikan usaha akan memberikan efek positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

## 7. Lingkungan (*better environment*)

Lingkungan merupakan aspek yang signifikan agar dapat mendapatkan perhatian pada tahapan pemberdayaan masyarakat. Melakukan penjagaan pada

kebersihan lingkungan melalui pembuangan sampah pada tempatnya, serta memilah sampah menjadi organik dan non-organik, bukan membakarnya; melakukan diversifikasi tanaman; mengolah produk pertanian yang memiliki nilai tambah, serta membangun komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat.

#### 8. Kehidupan (*better living*)

Pemberdayaan dapat mengubah kondisi kehidupan masyarakat. Masyarakat akan memiliki kehidupan yang lebih baik ketika mereka menjadi mandiri, yang terlihat jelas melalui peningkatan pendapatan yang mereka dapatkan.

#### 9. Masyarakat (*better community*)

Perbaikan yang dilakukan melalui program yang disusun secara sistematis akan membuat masyarakat menjadi lebih mandiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep perubahan yang dimulai dari tingkat bawah, di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga mereka mampu mengarahkan hidupnya dan berswadaya, Simatupang et al., (2021; Simatupang et al., (2022) dalam (Pakpahan, 2024).

#### 2.3.3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan masyarakat yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya antara lain:

1. Kegiatan pemberdayaan harus bersifat sukarela dan demokratis. Tidak boleh ada unsur paksaan dalam setiap kegiatan, karena setiap individu mempunyai bakat, minat, hingga potensi yang beraneka ragam. Dengan

demikian, pemberdayaan dilaksanakan dengan cara yang adil dan setara bagi semua orang.

2. Kebutuhan dan potensi individu menjadi dasar utama dalam pemberdayaan. Setiap orang memiliki keinginan dan keunggulannya masing-masing, sehingga pemberdayaan dimulai dengan mengembangkan potensi dan keinginan, yang akhirnya akan menghasilkan masyarakat mandiri.
3. Masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam proses pemberdayaan. Oleh karena itu, dalam menetapkan sasaran, pendekatan, serta kegiatan pemberdayaan didasarkan pada keinginan dan keputusan bersama masyarakat itu sendiri.
4. Penting untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat, karena budaya dan nilai-nilai tersebut merupakan identitas menjadi modal sosial dalam pembangunan.
5. Proses pembelajaran harus terus berlanjut agar potensi yang dimiliki individu dapat berkembang. Pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*) mampu menjadikan masyarakat dapat melakukan pembelajaran di mana saja, hingga kapan saja serta memfungsikan beragam sumber daya yang telah ada di lingkungan mereka.
6. Keberagaman budaya harus diperhatikan dalam pemberdayaan, karena hal ini dapat meningkatkan rasa toleransi dan kesadaran kita akan keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya di lingkungan sekitar.
7. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Partisipasi ini dimulai dengan merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan

memanfaatkan hasil dari kegiatan pemberdayaan. Partisipasi dapat diperkuat dengan (1) mempererat kebersamaan, empati, dan gotong royong; (2) memperkuat jaringan; dan (3) kemampuan untuk membangun partisipasi di tingkat pusat dan daerah.

8. Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dan kemandirian. Di era global ini, masyarakat membutuhkan individu yang memiliki semangat untuk membangun jaringan, menciptakan peluang, berani mengambil risiko, dan berinovasi.
9. Seorang agen perubahan harus mampu menginspirasi motivasi, serta kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam hal kemampuan digital (Zuraidah, 2020).

Peran pemberdayaan masyarakat berfungsi untuk meningkatkan kapasitas warga sehingga mereka dapat mengelola dan memutuskan secara mandiri langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kehidupan sosial mereka. Ife (1995) dalam (Pakpahan, 2024) mengemukakan 26 prinsip pada proses mengembangkan kehidupan masyarakat yang berhubungan, kemudian diklasifikasikan pada prinsip ekologis, keadilan sosial, penghargaan terhadap kearifan lokal, proses, serta hubungan antara global dan lokal. Beberapa prinsip tersebut antara lain:

1. Holisme

Holisme berarti menciptakan sebuah masyarakat yang utuh, di mana saling menghormati antar anggota masyarakat terjadi, serta ada keharmonisan antara kehidupan manusia dan alam, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam setiap aspek kehidupan.

## 2. Keberlanjutan

Pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan menjadi tolok ukur keberhasilan. Program pemberdayaan harus tetap berjalan meskipun masyarakat telah mandiri, agar tidak terhenti. Keberlanjutan ini penting agar masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan lebih mencintai produk dalam negeri, serta mengatur perkembangan teknologi yang berpotensi menurunkan etika.

## 3. Keanekaragaman

Keanekaragaman merujuk pada perbedaan yang ada pada setiap individu, yang mengharuskan kita untuk saling menghargai perbedaan tersebut. Setiap perbedaan memiliki solusi yang bervariasi, dan tidak ada satu jawaban yang tepat. Keanekaragaman melibatkan komunikasi yang terjalin dalam jejaring serta penggunaan teknologi yang sederhana.

## 4. Perkembangan Organik

Menghargai kondisi khusus yang berkembang dalam masyarakat dan mendorongnya untuk terus berkembang dengan cara-cara yang unik sesuai dengan dinamika masyarakat tersebut.

## 5. Keseimbangan

Menjaga keseimbangan antara aspek global dan lokal, gender, hak dan tanggung jawab, perdamaian, serta kerja sama.

## 6. Mengatasi Struktur yang Merugikan

Proses pengembangan masyarakat dapat menimbulkan masalah, seperti penindasan yang muncul akibat penyalahgunaan kekuasaan atau

pengabaian terhadap masalah sosial. Solusinya adalah dengan menemukan pemikiran bersama, bukan individual. Tujuannya adalah agar masyarakat mampu mandiri dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

#### 7. Mengatasi Wacana yang Merugikan

Masyarakat harus mampu mengidentifikasi dan meruntuhkan kekuasaan yang tidak adil, serta memahami bahwa pemberdayaan dapat memperkuat masyarakat yang terpinggirkan dan mendorong kesetaraan.

#### 8. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah revolusioner yang menantang struktur dominasi yang ada. Substansi tersebut bertujuan supaya menghadirkan masyarakat yang menjunjung tinggi sikap keadilan secara sosial dan membangun struktur yang efektif untuk pembangunan.

#### 9. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah bagian yang sangat penting dalam masyarakat untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar, misalnya hak bekerja, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpendapat.

#### 10. Definisi Kebutuhan

Fokus utama pemberdayaan adalah mengajak masyarakat berkomunikasi untuk memahami kebutuhan mereka sendiri, sehingga kebutuhan tersebut tidak ditentukan oleh pihak luar.

#### 11. Menghargai Pengetahuan Lokal

Pengetahuan lokal adalah sumber informasi yang sangat berharga dalam pemberdayaan masyarakat. Pengetahuan ini harus diakui dan

dihargai, bukan dianggap lebih rendah dari pengetahuan eksternal, yang hanya digunakan jika pengetahuan lokal tidak tersedia.

#### 12. Menghargai Budaya Lokal

Menghargai budaya lokal sebagai cara untuk menghadapi dampak negatif globalisasi. Budaya lokal yang sesuai dengan prinsip HAM serta keberlanjutan harus didukung sebagai bagian dari pengembangan masyarakat.

#### 13. Menghargai Sumber Daya Lokal

Pendekatan kebutuhan masyarakat menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya lokal, misalnya SDA, finansial, hingga manusia, alih-alih bergantung pada dukungan luar.

#### 14. Menghargai Keterampilan Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat relevan dengan konteks mereka, yang mungkin sangat dibutuhkan untuk pengembangan daerah tersebut.

#### 15. Menghargai Proses Lokal

Seluruh substansi tidak akan mengalami keberhasilan apabila mendapatkan pemaksaan dari pihak eksternal. Oleh karena itu, pendekatan berbasis masyarakat yang sesuai dengan konteks lokal dan budaya masyarakat adalah alternatif yang lebih tepat.

#### 16. Partisipasi

Pekerja sosial harus memahami kompleksitas partisipasi yang melibatkan berbagai golongan, gender, dan etnis, serta mempromosikan

inklusivitas. Analisis partisipasi yang mengarah pada pemberdayaan sangat penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat.

#### 17. Proses, Hasil, dan Visi

Visi lebih menekankan pada gambaran umum mengenai tujuan dari suatu proses, bukan sekadar hasil. Hal ini penting agar proses tersebut memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur.

#### 18. Integritas Proses

Tahapan pada proses mengembangkan sikap masyarakat lebih signifikan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh, walaupun hasil tetap penting. Proses yang baik harus mencerminkan harapan yang sesuai dengan visi dan mempertimbangkan keberlanjutan, keadilan sosial, hingga HAM.

#### 19. Menumbuhkan Kesadaran

Pekerja sosial harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, baik secara formal maupun informal, melalui komunikasi sehari-hari, berbagi pengalaman tentang ketidakadilan, dan mendorong tindakan kolektif.

#### 20. Kerja sama dan Konsensus

Pendekatan ekologis dan tanpa kekerasan merujuk pada signifikansi atas struktur kooperatif daripada kompetitif, dengan keputusan yang diambil melalui konsensus untuk mencapai tujuan bersama.

## 21. Langkah Pembangunan

Masyarakat harus menentukan langkah pengembangan mereka sendiri, karena memaksakan perkembangan yang terlalu cepat dapat merusak komitmen dan rasa memiliki terhadap proses tersebut.

## 22. Perdamaian dan Anti-Kekerasan

Prinsip anti-kekerasan melampaui pembebasan dari kekerasan fisik. Kekerasan struktural juga harus dihadapi dengan cara yang konstruktif, tanpa menyerang atau mengucilkan, tetapi dengan bekerja bersama secara harmonis.

## 23. Inklusivitas

Proses yang dijalankan harus selalu berusaha untuk mengakomodasi semua pihak, meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda. Setiap individu harus memiliki kesempatan untuk mengubah posisi mereka.

## 24. Membangun Masyarakat

Pembangunan masyarakat menekankan pentingnya memperkuat ikatan antar anggota masyarakat dengan menekankan saling ketergantungan daripada ketergantungan atau kemandirian, serta memperkuat hubungan sosial di dalam masyarakat.

## 25. Menghubungkan yang Global dan Lokal

Pekerja sosial harus memahami hubungan antara aspek global dan lokal, serta bagaimana mereka saling melaksanakan interaksi hingga memberikan pengaruh satu dengan lainnya.

## 26. Praktik Anti-Kolonialis

Pekerja sosial perlu melawan praktik kolonialisme dengan meningkatkan kesadaran diri dan kesadaran politik, serta memberikan kesempatan untuk masyarakat mengembangkan pemikiran alternatif dan memperkuat solidaritas mereka (Pakpahan, 2024).

### 2.3.4. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa "masyarakat bukanlah objek dari proyek pembangunan, melainkan subjek dalam pembangunan itu sendiri". Berkaitan pada konsepsi tersebut, model pembangunan pemberdayaan masyarakat seharusnya menggunakan pendekatan yang meliputi:

1. Pertama, pendekatan yang terfokus, yaitu usaha yang diarahkan pada kelompok yang membutuhkan, melalui program yang dilakukan perancangan sebagai proses penyelesaian permasalahan mereka hingga mampu memberikan pemenuhan terhadap keperluan yang mereka inginkan.
2. Kedua, mengikutsertakan masyarakat yang menjadi sasaran, bahkan mereka harus turut serta dalam pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian memberikan peningkatan akan keterampilan masyarakat pada proses perancangan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban pada segala pengupayaan agar memberikan peningkatan pada mutu kehidupan hingga taraf perekonomian mereka.

3. Ketiga, melalui pendekatan berbasis kelompok, mengingat bahwa masyarakat kurang mampu cenderung kesulitan menyelesaikan masalah secara individu. Selain itu, kerja sama antar kelompok yang lebih maju akan saling memberikan manfaat dan mempercepat kemajuan kelompok tersebut. Untuk keperluan analisis pemberdayaan masyarakat, pendekatan yang digunakan harus mencakup baik pendekatan Komprehensif Rasional maupun Inkremental (Riana Freza, 2018).

#### 2.3.5. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana dikutip dalam (Purwowibowo, 2017), Pemberdayaan Masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait, misalnya :

1. Pertama, Peranan Pemerintah yang disebut sebagai birokrasi. Pemerintah perlu memberikan penyesuaian atas misi tersebut, dapat melakukan pembangunan akan keikutsertaan masyarakat, melaksanakan interaksi dengan rakyat, melahirkan susunan ketetapan dan aturan mengenai mekanisme pasar yang cenderung memihak pada kalangan masyarakat menengah ke bawah.
2. Kedua, berbagai kelembagaan masyarakat di luar masyarakat itu sendiri, kelembagaan bersifat swadaya masyarakat, lembaga masyarakat nasional hingga daerah.

3. Ketiga, kelembagaan masyarakat yang berkembang pada lingkungan masyarakat tersebut atau *local community organization*, misalnya BPD, PKK, Karang Taruna dan lain sebagainya,
4. Keempat, koperasi yang menjadi sarana perekonomian masyarakat ialah kelembagaan sosial yang merujuk pada aspek pembangunan usaha, perekonomian yang telah disesuaikan pada upaya demokrasi perekonomian Indonesia.
5. Kelima, Pendamping sangat dibutuhkan sebab masyarakat kurang mampu kerap kali memiliki keterbatasan pada proses perkembangan diri hingga komunitas mereka.
6. Keenam, pemberdayaan perlu mencerminkan pada tahapan perencanaan pembangunan nasional dalam mengedepankan tahapan *bottom up*.
7. Ketujuh, Keikutsertaan masyarakat secara aktif secara spesifik dalam lingkungan usaha serta swasta.

Kajian Parsons et.al. (1994:112-113) dalam (Suharto, 2021), mengidentifikasi apabila proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

1. Aras Mikro.

Pemberdayaan dilaksanakan kepada klien melalui cara perorangan dengan memberikan bimbingan, proses konseling, pengelolaan stress, *crisis intervention* yang bertujuan sebagai proses pembimbing serta pelatihan

kepada klien pada proses realisasi beragam penugasan kehidupan. Metodologi tersebut kerap kali dikatakan sebagai pendekatan yang memusatkan pada penugasan individu atau *task centered approach*.

## 2. Aras Mezzo.

Pemberdayaan dilaksanakan pada sejumlah kelompok klien. Pemberdayaan dilaksanakan melalui penggunaan komunitas sebagai media atau pola intervensi. Pendidikan serta pelatihan, dinamika kolektif, yang kerap difungsikan sebagai prosedur pada peningkatan kesadaran, khazanah keilmuan, keterampilan hingga penanganan klien supaya mempunyai keterampilan dalam pemecahan masalah yang mereka lalui.

## 3. Aras Makro.

Pendekatan sebagai taktik sistem masif atau *large system strategic* sebab target perubahan diarahkan terhadap sistem lingkungan secara lebih meluas. Proses perumusan ketetapan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pelobian, organisasi kemasyarakatan, manajemen konflik merupakan beragam taktik pada proses pendekatan tersebut. Taktik sistem secara masif memiliki pandangan apabila klien merupakan individu yang mempunyai sejumlah potensi agar dapat memahami kondisi mereka sendiri serta agar dapat melakukan pemilihan hingga menentukan strategi secara lebih tepat dalam mengambil tindakan.

Kajian Schwartz (1961 : 157-158) dalam (Suharto, 2021), menyatakan apabila terdapat beberapa penugasan yang dilakukan oleh para pekerja sosial, antara lain:

1. Melaksanakan kesamaan secara mendasar di antara tanggapan masyarakat tentang keperluan mereka secara individu hingga segala aspek tuntutan sosial yang mereka alami di lingkungan masyarakat.
2. Memberikan pendeteksian hingga melewati segala kesulitan yang menjadi hambatan segenap individu hingga mengakibatkan frustrasi segala upaya individu agar melakukan identifikasi kepentingan mereka serta kepentingan sejumlah individu yang memberikan pengaruh secara signifikan.
3. Memberikan pengupayaan data tentang gagasan, fakta, penilaian, hingga konsepsi yang tidak mempunyai sistem kemasyarakatan namun memberikan fungsi untuk mereka pada proses menghadapi realita sosial hingga hambatan yang mereka alami.
4. Melakukan pembagian terhadap visi kepada masyarakat, keinginan hingga penyampaian pendapat pekerja sosial ialah bentuk investasi pada proses komunikasi di antara individu dengan masyarakat serta untuk mengedepankan kesejahteraan individu serta sosial.
5. Mendefinisikan beragam persyaratan serta pembatasan kondisi melalui sistem relasi di antara pekerja sosial hingga masyarakat yang dilakukan pembentukan. Beragam peraturan terkait akan memberikan pembentukan pada konteks kontrak kerja yang memberikan ikatan masyarakat serta kelembagaan. Beragam batasan akan menghadirkan keadaan yang mampu menjadikan masyarakat dengan pekerja sosial melaksanakan fungsi mereka masing-masing.

## 2.4. Bank Sampah

### 2.4.1. Pengertian Bank Sampah

Bank Sampah ialah tata kelola sampah dengan cara bersama yang memiliki tujuan memberikan dukungan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam menanggulangi sampah di lingkungan mereka. Sistem memiliki fungsi melakukan pengumpulan, melakukan pemilahan, hingga melakukan pendistribusian sampah yang mempunyai nilai praktis pasar, di mana masyarakat mampu mendapatkan kegunaan perekonomian dengan turut aktif pada aktivitas menabung sampah. Shomedran, (2016: 8) dalam (Khamim, 2021).

Mengacu pada pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank sampah didefinisikan sebagai prinsip pengolahan sampah secara bersama-sama yang mirip dengan aktivitas di bank dengan menyertakan rekening agar dapat menampung, melakukan pemilahan hingga memberikan penyaluran sampah dengan nilai ekonomi terhadap pangsa pasar melalui keikutsertaan masyarakat. Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No 13 Tahun 2012 Bank Sampah merupakan sarana yang difungsikan untuk memilah, hingga mengumpulkan barang tidak terpakai yang mana mampu dilakukan proses daur ulang yang menghasilkan nilai ekonomi yang sangat tinggi (Fauziah, 2020).

Berkaitan pada ketentuan Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, pengertian Bank Sampah merupakan adanya fasilitas dan sarana dalam proses pengelolaan sampah melalui aspek 3R yakni *reduce*, *reuse* hingga *recycle*, yang merupakan sarana pendidikan, perubahan tindakan terhadap proses

tata kelola sampah, hingga implementasi pada ekonomi sirkular yang disusun serta dilaksanakan oleh masyarakat, suatu kelembagaan usaha hingga pemerintah daerah (Rahman, 2024).

Dalam pengelolaannya, sampah yang telah dipilah dan dipisahkan akan dikumpulkan dalam jumlah dan periode tertentu untuk kemudian dijual, digunakan kembali, atau diolah berdasarkan pada tahapan daur ulang supaya mempunyai nilai ekonomi atau fungsi baru. Secara prinsip, bank sampah memiliki kesamaan dengan bank konvensional yang menyimpan uang, tetapi perbedaannya terletak pada nasabah yang menyetorkan sampah hasil aktivitas sehari-hari mereka, seperti sampah rumah tangga maupun limbah tak terpakai, bukan uang (Rahmadani, 2020).

#### 2.4.2. Jenis-jenis Sampah

Sampah padat yang dikategorikan berdasar pada asalnya, dikelompokkan terhadap tiap klasifikasi, antara lain:

##### 1. Sampah organik

Sampah organik berasal dari bahan-bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan, yang umumnya dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan, atau berasal langsung dari alam. Sampah jenis ini bersifat *biodegradabel*, artinya dapat terurai secara alami tanpa memerlukan proses kimiawi dan dapat didegradasi oleh mikroba.

Sampah rumah tangga merupakan sebagian besar sampah organik, dengan pasar tradisional sebagai penyumbang utama. Contoh sampah

organik meliputi sisa makanan, sampah dari dapur, buah busuk, kulit buah, kotoran hewan, kotoran manusia, serta pembungkus yang tidak terbuat dari kertas, karet, atau plastik. Selain itu, sampah dari pepohonan seperti ranting, dedaunan, dan serbuk batang kayu juga termasuk dalam kategori ini (Juniartini, 2020).

## 2. Sampah anorganik atau non-organik

Sampah anorganik berasal dari bahan non-hayati yang bersumber dari bahan alam tak terbarukan, seperti mineral, minyak bumi, produk sintetis, serta hasil pengolahan bahan tambang dan industri. Berbeda dengan sampah organik, sampah ini tidak mudah terurai, sehingga memerlukan langkah-langkah khusus untuk mempercepat proses penguraiannya.

Sampah anorganik mencakup bahan logam, plastik, kertas, kaca, keramik, dan detergen. Sebagian besar jenis sampah ini tidak dapat terurai oleh alam atau mikroorganisme (*unbiodegradable*), sementara sebagian memerlukan waktu lama untuk terurai, seperti plastik, pecahan kaca, potongan besi dan tembaga, botol, kaleng bekas, serta limbah dari pabrik dan kendaraan bermotor (Agina Naomi, 2020; Akhmad Affandi, 2010; Bank Sampah Jakarta, 2013) yang sebagaimana dikutip dalam (Yunus. A, 2022).

Sedangkan menurut Daniel (2009) dalam (Juniartini, 2020) , sampah dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan sifatnya, yaitu:

1. Sampah organik: Sampah yang tersusun atas berbagai bahan yang mampu diuraikan dengan cara yang lebih natural atau biologi, misalnya pada sisa

makanan, daun dan ranting pohon yang telah mengering. Sampah jenis tersebut, dikatakan sebagai sampah basah.

2. Sampah anorganik: Sampah yang dari bahan-bahan yang sulit terurai secara alami, yang memerlukan pengolahan khusus, seperti plastik, kaleng, dan styrofoam. Sampah ini sering disebut sebagai sampah kering.
3. Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3): Limbah yang berasal dari bahan-bahan yang berbahaya dan beracun, seperti limbah rumah sakit, limbah industri, dan lainnya

Jika sampah dikategorikan berdasarkan kondisi fisiknya, dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Sampah basah (*garbage*)

Jenis sampah ini meliputi sisa makanan atau bahan-bahan yang berasal dari pengolahan makanan di rumah tangga, seperti sayuran, yang mudah membusuk dan mengandung kadar air tinggi. Sampah ini cenderung cepat membusuk dan menghasilkan bau yang tidak sedap.

2. Sampah kering (*rubbish*)

Sampah kering terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a Sampah yang tidak dapat hancur.

Sampah ini tidak bisa terurai secara alami meskipun memerlukan waktu yang sangat lama, contohnya seperti kaca dan mika.

b Sampah yang sulit hancur

Sampah ini cenderung terurai secara perlahan meskipun membutuhkan waktu. Jenis sampah ini bisa dibagi lagi menjadi sampah yang mudah terbakar, seperti kertas dan kayu, serta sampah yang sulit terbakar dan tidak hancur, seperti kaleng bekas dan kawat besi.

2.4.3. Metode Pengelolaan Bank Sampah di Indonesia

Keberadaan Bank Sampah memberikan manfaat dari bidang perekonomian bahkan lingkungan. Pada aspek ekonomi, Bank Sampah memberikan kontribusi dalam meningkatnya penghasilan masyarakat, sedangkan pada ranah lingkungan, Bank Sampah memberikan peranan pada proses mendukung kemandirian masyarakat pada proses tata kelola sampah. Suatu inovasi dan pembaharuan masyarakat pada proses pengelolaan sampah melalui pembangunan Bank Sampah yang dilaksanakan pada tingkat komunitas (Rahman, 2024).

Metode difungsikan pada proses pengelolaan sampah yang tersebar pada masyarakat ialah dengan cara konsepsi pengolahan sampah yang ditetapkan pada Bank Sampah ialah melalui implementasi sistem *zero waste*. Konsepsi tersebut merujuk pada pemanfaatan perkembangan teknologi tata kelola sampah dengan mengintegrasikan pada lingkungan perkotaan yang bertujuan sebagai pengurangan jumlah sampah. Konsepsi tersebut berkaitan pada ketetapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang berisi mengenai proses tata kelola sampah melalui pendekatan *Reduce, Reuse, Recycle* (3R), yang tersusun atas, antara lain:

1. Reduce: Pendekatan tersebut memiliki tujuan sebagai proses pengurangan penggunaan barang dan material agar tidak menambah jumlah sampah.
2. Reuse: Pendekatan ini mendorong penggunaan kembali barang-barang yang masih layak pakai dan menghindari penggunaan barang sekali pakai untuk memperpanjang usia barang tersebut sebelum menjadi sampah.
3. Recycle: Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang baru.

Dengan menerapkan 3R, sampah yang semula dianggap tidak berguna, dapat diubah menjadi sesuatu yang bernilai. Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat secara aktif pada aktivitas daur ulang sangat signifikan, baik sebagai penghasil sampah maupun sebagai produsen barang. Meskipun demikian, kendala utama dalam penerapan 3R adalah minimnya taraf kesadaran masyarakat agar dapat melakukan pemilahan terhadap sampah, yang mana peranan pemerintah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang signifikansi Bank Sampah dengan mengembangkan pola pendekatan 3R.

Untuk itu, pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dapat diperluas dengan pendekatan 4R, seperti yang disarankan oleh Kusminah dalam (Rahman, 2024).

Pendekatan 4R terdiri dari:

1. Reduce: Mengurangi sampah dan membatasi penggunaan barang untuk menghindari sampah berlebih, seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

2. Reuse: penggunaan ulang berbagai barang yang masih dapat dimanfaatkan, yang dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi serta menjaga kebersihan lingkungan.
3. Recycle: melakukan daur ulang sampah yang masih dapat didaur ulang, seperti melalui pembuatan pupuk kompos atau produk kerajinan dari plastik bekas.
4. Replace: Mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggantinya dengan tas belanja atau bahan lain yang ramah lingkungan, serta mengganti styrofoam yang sulit terurai secara alami (Rahman, 2024)

#### 2.4.4. Peran Bank Sampah

Bank Sampah berfungsi sebagai titik pengumpulan bagi produsen untuk menampung produk dan kemasan yang sudah tidak terpakai. Dengan pola ini, sebagian tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah dialihkan kepada masyarakat. Diharapkan pendekatan ini dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Prinsip 3R diharapkan mampu menjadi solusi terpadu dalam menangani permasalahan sampah sehingga tujuan akhir kebijakan pengelolaan sampah dapat tercapai melalui peran bank sampah. Namun, pelaksanaan kegiatan 3R masih menghadapi tantangan utama, yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah (Fauziah, 2020).

Program pengelolaan sampah dengan upaya Bank Sampah sudah dijadikan sebagai penyelesaian alternatif pemerintah serta masyarakat ketika menanggulangi

meningkatnya jumlah sampah yang makin susah untuk dikendalikan. Hingga kini, pemerintah terus mengintensifkan sosialisasi terkait pengelolaan sampah secara perorangan dan kelompok melalui Bank Sampah. Selain memberikan manfaat positif pada lingkungan, pengolahan Bank Sampah mempunyai mekanisme korelasi serta jaringan sosial yang bernilai ekonomis.

Manfaat sistem pengelolaan sampah terbagi menjadi dua aspek. Pertama, dari sisi kesehatan lingkungan, sistem ini menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari tumpukan sampah, mengurangi kebiasaan membakar sampah yang dapat mencemari udara, serta menekan praktik penimbunan sampah. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan.

Kedua, dari aspek sosial ekonomi, sistem pengelolaan sampah memberikan peluang untuk meningkatkan penghasilan keluarga melalui tabungan sampah. Kemudian, korelasi di antara anggota masyarakat mampu menjadi sangat lekat hingga mampu meminimalkan biaya transportasi yang perlu dikeluarkan pengepul agar mampu mengangkut semua sampah.

Secara mendasar, bank sampah berfungsi sebagai tempat yang melibatkan berbagai pihak agar mampu memberikan peningkatan akan kesadaran masyarakat pada suatu *lifestyle* yang lebih bersih serta menjaga kesehatan. Tetapi tujuan pokok adanya bank sampah merupakan penciptaan lingkungan yang bersih serta sehat dengan cara adanya proses tata kelola sampah dengan maksimal, dengan cara memberikan peningkatan akan penghasilan keluarga. Substansi tersebut merupakan suatu daya interaktif masyarakat lingkungan menengah ke bawah yang masih melalui hambatan perekonomian (Fauziah, 2020).

## 2.5. Green Social Work

### 2.5.1. Definisi Green Social Work

*Green Social Work* dikatakan juga sebagai praktis kerja sosial secara profesional yang terfokus dengan adanya sikap ketergantungan antara masing-masing perorangan, kelembagaan sosial hingga korelasi di antara individu lain hingga flora dan fauna pada habitat fisik mereka, interaksi antara krisis lingkungan sosial ekonomi serta fisik hingga tingkah laku secara personal yang dapat memberikan kerusakan kesejahteraan individu serta planet di Bumi (Achmad, 2023)

Dominelli (2018) sebagai mana dikutip dalam (Achmad, 2023) menjelaskan bahwa *Green Social Work (GSW)* merupakan metodologi holistik terhadap permasalahan lingkungan yang mendorong pekerja sosial untuk mengintegrasikan prinsip, nilai, dan kepedulian terhadap kerusakan lingkungan serta bencana yang terkait ke dalam praktik masyarakat secara konkret. Lebih lanjut, Dominelli (2018) menegaskan bahwa pekerja sosial yang menerapkan pendekatan *Green Social Work* dalam praktik profesionalnya dikenal sebagai Pekerja Sosial Hijau.

Namun, tidak semua pekerja sosial dapat diklasifikasikan sebagai Pekerja Sosial Hijau, karena *Green Social Work* memiliki keunikan tersendiri dalam proses internalisasinya. Melalui pendekatan ini, pekerja sosial dapat menggabungkan keberlanjutan lingkungan dengan fungsi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dominelli dan Ku (2017) dalam (Kusuma, 2023) juga menekankan

bahwa perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan fisik merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari praktik profesional pekerja sosial.

*Green Social Work* (GSW) merupakan konsep yang sedang berkembang, yang berfokus pada penyediaan alat bagi pekerja sosial untuk berpartisipasi dalam menangani ancaman lingkungan, sambil menyesuaikan penelitian, praktik, dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik para penyintas bencana.

*Green Social Work* mengintegrasikan teori keadilan sosial dan lingkungan untuk memberikan pendekatan yang dapat disesuaikan oleh pekerja sosial dalam praktik mereka, apapun ruang lingkungannya. Perbedaan utama antara GSW dan praktik kerja sosial pada umumnya adalah dimasukkannya elemen lingkungan alam dan fisik dalam praktik, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan klien serta ekosistem tempat mereka tinggal (Breen, 2023).

*Green Social Work* (GSW) mengusung pendekatan holistik terhadap krisis lingkungan, memberikan dukungan kepada para pekerja sosial supaya mampu memberikan pertimbangan akan penilaian, gagasan hingga perhatian mereka tentang degradasi lingkungan hingga bencana yang pada kelompok praktis mereka. Pekerja sosial yang melakukan pengadopsian pada konsep *Green Social Work* pada kenyataan profesionalnya di kenal sebagai Pekerja Sosial Hijau.

Artinya tidak semua Pekerja Sosial dapat disebut Pekerja Sosial Hijau (*Green Social Work*), karena Pekerja Sosial Hijau memiliki identitas unik yang mereka bentuk melalui berbagai terapi dan aktivitas seiring waktu. Pendekatan ini memungkinkan Pekerja Sosial untuk menggabungkan keberlanjutan lingkungan

dan fungsi sosial untuk mewujudkan kehidupan komunitas yang lebih sejahtera di masa depan (Breen, 2023).

#### 2.5.2. Perkembangan Green Social Work di Indonesia

*Green Social Work* (GSW) saat ini berkembang melalui empat jalur utama: penelitian, kebijakan, pendidikan, dan pengalaman lapangan. *Green Social Work* memandang bahwa menjaga keseimbangan ekosistem lintas disiplin ilmu adalah tanggung jawab untuk mencapai keberlanjutan di masa depan. *Green Social Work* memperkenalkan paradigma baru dalam menangani isu lingkungan, yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut.

*Green Social Work* juga mengajak pekerja sosial untuk terlibat dalam perubahan sosial yang berkelanjutan dan transformatif demi terciptanya lingkungan yang sejahtera dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, *Green Social Work* sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mendasarinya.

*Green Social Work* dianggap sebagai praktik pekerjaan sosial profesional yang fokus pada ketergantungan antar individu, organisasi sosial, serta hubungan antara manusia dan alam, termasuk flora dan fauna di habitatnya, serta interaksi yang terjadi antara krisis lingkungan sosial, ekonomi, dan fisik, serta perilaku interpersonal yang merusak kesejahteraan manusia dan bumi (Roberts, 2009) dalam (Achmad, 2023). Pendekatan ini menyelesaikan masalah dengan merancang dasar sosial masyarakat lokal yang saling terhubung satu sama lain.

Pekerja sosial pada konteks melestarikan lingkungan juga menyertakan penerima layanan dengan cara pendekatan holistik yang dapat menyatukan persona

agar dapat memberikan penjagaan pada lingkungan fisik, sosial, politik, perekonomian hingga kebudayaan pada masyarakat di lingkungan mereka. Merujuk pada kajian ini, stabilitas atau keseimbangan hidup memerlukan keseimbangan serta keberlanjutan pada beragam aspek. Metode tersebut dilaksanakan sebagai proses pengupayaan dalam perlindungan manusia atas potensi kerugian di waktu yang akan datang.

Oleh sebab itu, proses pembangunan memiliki tujuan agar dapat menguasai alam demi keuntungan seharusnya dihentikan dan digantikan dengan kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Achmad, 2023).

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), pada tahun 2012 terdapat 147 kasus kekerasan dan kriminalisasi terkait isu lingkungan. Pada tahun berikutnya, jumlahnya meningkat cukup signifikan menjadi 227 kasus yang melibatkan konflik mengenai lingkungan hidup, sumber daya alam, dan agraria yang berujung pada kekerasan serta kriminalisasi.

Substansi tersebut menyatakan apabila permasalahan lingkungan sangat kompleks dibandingkan dengan apa yang kerap dibayangkan. Permasalahan lingkungan hidup kerap kali minum memperoleh perhatian secara serius, yang utama dari pemerintah, sedangkan beragam kasus yang berkaitan pada isu permasalahan tersebut hanya sekadar perjuangan masyarakat sebagai korban. Kerap kali, beragam pihak lain yang tidak terlibat menutup mata dan telinga pada realita, walaupun pembuktian yang tersedia menyatakan ketidakadilan pada masyarakat.

Gerakan pekerja sosial pada proses melestarikan lingkungan hidup kerap disebut sebagai politik hijau serta konservasi yang merujuk pada beragam macam gerakan poly, sosial hingga keilmiahan yang terfokus dalam permasalahan perekonomian yang kerap hadir pada lingkungan masyarakat (Achmad, 2023). Kerusakan lingkungan yang makin pesat pada beberapa periode terakhir tersebut memerlukan taktik secara berkelanjutan hingga menyeluruh dan kombinasi pada instrumen lain misalnya pada insentif ekonomi, hukum, hingga ketetapan yang mampu meraih keseimbangan lingkungan.

Secara mendasar, sistem tata kelola lingkungan hidup perlu mengedepankan sikap holistik serta mengikutsertakan dorongan dari beragam aspek. Dengan demikian, gerakan pekerja sosial hadir untuk mengumpulkan kekuatan dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang ideal bagi semua pihak yang terlibat.

Adanya pekerja sosial profesional yang memiliki fokus dalam tata kelola lingkungan hidup dengan lebih realitas mampu memiliki peranan signifikan pada kehidupan individu. Pekerja sosial tersebar di berbagai tingkat, dari regional hingga lokal, melalui Ikatan Pekerja Sosial Internasional (*International Federation of Social Work/IFSW*). Aktivitas tersebut misalnya, mereka dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup yang mendukung kehidupan manusia di masa depan. Selain itu, ahli kesejahteraan sosial dan pekerja sosial profesional memainkan peran penting dalam mempengaruhi sikap masyarakat terhadap lingkungan mereka. Sikap pertama yang harus dimiliki pekerja sosial profesional dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah *'Positive-*

*greens'*, yakni upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat tindakan manusia sekecil mungkin Glajchen et al., (2018) dalam (Achmad, 2023).

Seluruh aktivitas individu seharusnya memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia dan berusaha mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sikap ini perlu diupayakan oleh pekerja sosial untuk menyadarkan masyarakat bahwa setiap tindakan mereka harus membawa dampak positif bagi lingkungan, seperti dengan menanam pohon, menghemat SDA hingga senantiasa memiliki kepedulian pada lingkungan di sekitarnya.

Sikap '*Waste-watchers*', yakni pengupayaan agar mampu melakukan daur ulang semaksimal mungkin terhadap barang yang difungsikan oleh individu. Substansi tersebut berkaitan pada permasalahan sampah yang makin beragam dan banyak bentuknya. Melalui proses daur ulang, total keseluruhan sampah yang dihasilkan mampu diminimalkan. Pekerja sosial serta ahli kesejahteraan masyarakat mampu memberikan kontribusi pada masyarakat agar mengedepankan kepedulian serta memiliki kesadaran dalam rangka proses daur ulang sampah.

### 2.5.3. Model Intervensi Green social Work

Tata laksana berupa intervensi ialah substansi pada program yang dijalankan oleh pekerja sosial pada aspek pelestarian lingkungan hidup agar melakukan tahapan intervensi kelompok. Pendekatan *Green Social Work* difungsikan agar mengatasi segala permasalahan sosial perekonomian yang muncul pada lingkungan masyarakat. Intervensi merujuk pada segala kegiatan konkrit pada masyarakat agar melakukan program dengan prinsip konsistensi yang mana salah

satunya ialah pemberian dorongan pada anggaran serta profesional pada pelaksanaan.

Melalui mempertimbangkan aspek sosial, perekonomian, hingga lingkungan, diproyeksikan apabila beragam intervensi tersebut mampu dilakukan secara berlanjut yang bertujuan dalam proses peningkatan kesejahteraan sosial dengan program wirausaha dengan landasan lingkungan. Milner et al., (2020) dalam (Achmad, 2023).

Hal tersebut disebabkan oleh potensi kesejahteraan sosial yang besar serta tingginya angka kemiskinan di masyarakat sekitar. Dalam mencapai tujuan intervensi, berbagai pendekatan dilakukan untuk memberikan peningkatan pada kesejahteraan rakyat. Tahapan intervensi sosial dengan berlandaskan pada *Green Social Work* mampu direalisasikan dengan beragam proses, misalnya pada kelas motivasi serta kampanye sosial (Thompson, 2020).

Motivasi sebagaimana dikutip dalam (Nidawati, 2024) adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang didefinisikan oleh keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Keinginan untuk sukses dalam hidup memotivasi dan bereaksi terhadap usaha. Hal ini memotivasi individu untuk melakukan pekerjaan, ambisi, dan dorongan yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar yang luar biasa

*Self-determination theory* (SDT) merupakan teori psikologi yang telah difungsikan guna memberikan penjelasan mengenai motivasi serta menentukan nasib individu pada berbagai aspek internal (Zulkarnaen, 2023). Menurut SDT, orang cenderung lebih berpartisipasi dalam kegiatan pada saat mereka merasa telah memiliki sikap kemandirian yang teguh, memiliki daya kompetensi yang tinggi,

hingga mampu berkorelasi dengan pihak lainnya. SDT ialah metodologi berupa motivasi yang mengedepankan pada signifikansi tiga tuntutan psikologi penting, antara lain (Zulkarnaen, 2023) :

1. Kebutuhan Otonomi (*Autonomy*)

Tuntutan otonomi menunjukkan keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang disukai dan menjadi kekuatan pendorong di balik perilaku seseorang.

2. Kebutuhan Kompetensi (*Competence*)

Individu dengan kebutuhan kompetensi mempunyai keinginan untuk terhubung secara efektif dengan lingkungannya, kebutuhan untuk merasa kompeten dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan, dan keinginan untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan.

3. Kebutuhan Keterkaitan dengan lingkungan (*Relatedness*)

Keterkaitan mengacu pada sentimen keterhubungan atau keterlibatan dalam lingkungan sosial tertentu.

Tahapan dalam mengendalikan tingkah laku serta mengambil keputusan ialah substansi pada suatu kebijakan otonomi, keperluan agar merasa mampu serta efektivitas ialah substansi pada kompetensi, serta memiliki perasaan terkoneksi pada individu lainnya ialah substansi pada adanya keterkaitan. Oleh sebab itu, apabila ketiga kebutuhan telah mampu dipenuhi, seseorang akan mengalami motivasi intrinsik serta melibatkan pada kegiatan yang sejalan pada penilaian serta peminatan yang mereka miliki (Zulkarnaen, 2023).

Penerapan teori *Self-Determination* dalam konteks intervensi *Green Social Work* dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk secara mandiri berpartisipasi dalam kegiatan pro-lingkungan. Ketika kebutuhan dasar seperti otonomi, kompetensi dan keterkaitan terpenuhi, masyarakat akan lebih terdorong melakukan praktik pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Intervensi ini bertujuan memberi dukungan psikososial terhadap keluarga supaya mampu melaksanakan kegiatan keseharian dengan baik dan menjalankan fungsi sosial mereka. Dalam kelas motivasi ini, materi yang disampaikan bisa berupa tips mengenai pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Lebih jauh, teori komunikasi persuasif Carl Hovland mendefinisikan komunikasi persuasif sebagai suatu proses pengalihan makna dengan tujuan mengarahkan atau membujuk lawan bicara. Ada berbagai komponen yang menjadi dasar komunikasi persuasif.

Komponen-komponen meliputi komunikator, pesan, dan media yang digunakan. Komunikator merupakan pemberi pesan, oleh karena itu pemilihan komunikator harus cermat agar pesan atau ajakan yang dimaksud dapat tersampaikan (Mirawati, 2021)

Pesan adalah apa yang ingin disampaikan kepada orang lain, dan media adalah saluran atau alat yang dapat digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan. Komunikasi persuasif umumnya ditemukan dalam iklan, himbauan, dan ceramah.

Komunikasi persuasif biasanya memiliki tujuan tertentu, seperti memengaruhi pendapat atau perilaku. Secara umum, penerapan strategi komunikasi

persuasif ini melibatkan lima tahap yang berpuncak pada keputusan untuk mengubah keyakinan atau sikap. Tahap-tahap ini meliputi memperhatikan, mengungkapkan minat, menciptakan keinginan yang lebih kuat, adanya keputusan, dan akhirnya tindakan perubahan (Mirawati, 2021)

Komunikasi persuasif bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan informasi tetapi juga untuk mempengaruhi opini atau perilaku penerima pesan melalui tahapan yang sistematis. Hal ini sejalan dengan intervensi Green Social Work yang membutuhkan penyampaian pesan lingkungan secara efektif agar mampu menggerakkan partisipasi aktif masyarakat.

Pekerja sosial dapat memberikan stimulus dan wawasan mendalam agar masyarakat bisa bekerja sama dan berpartisipasi lebih dalam menjaga lingkungan. Pekerja sosial juga mendorong masyarakat supaya memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki hingga mengupayakan mendapatkan pendapatan tambahan dengan cara manajemen yang optimal, sambil memberikan dorongan nin moral yang dilakukan melalui strategi menghadapi sistematis dan dinamika kelompok usaha supaya aktivitas perekonomian mampu dilanjutkan secara lebih konsisten, (2015) dalam (Achmad, 2023).

Pekerja sosial berperan pada proses melestarikan lingkungan yang bertujuan agar bersih kesejahteraan rakyat secara lebih lanjut, di antara sebagai fasilitator, edukator, motivator, mediator, dan inisiator. Pendekatan pada pekerjaan sosial tersebut memberikan dorongan atas kebersamaan di antara disiplin ilmu agar menguatkan intervensi dalam lingkungan masyarakat.

Para ahli kesejahteraan sosial serta pekerja sosial memberikan kesadaran masyarakat mengenai signifikansi implementasi energi dengan lebih efisien pada rumah tangga serta *public area*. Proses penyadaran tersebut sering kali kurang efektif, yang mana penting untuk ahli kesejahteraan sosial serta pekerja sosial agar memperhatikan tahapan kolektif pada proses penyelesaian masalah secara global tersebut yang mampu dilaksanakan dengan sejumlah kebijakan-kebijakan dan ketetapan pemerintah. Proses pembangunan kesejahteraan sosial dengan berlandaskan lingkungan ialah konsepsi pada hakikat manusia yang dilakukan pandangan sebagai instrumen signifikansi pada proses pembangunan lingkungan masyarakat.

Manusia, sebagai warga negara dan masyarakat, harus dapat ikut serta secara aktif pada tahapan pembangunan dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Achmad, 2023).

## **2.6. Kesadaran Lingkungan**

### **2.6.1. Konsep Kesadaran Lingkungan**

Hasil kajian teroretik mengenai tingkat kesadaran lingkungan hidup pada Neolaka (1991) dalam (Neolaka, 2008), mengidentifikasikan apabila kesadaran merupakan kondisi munculnya jiwa atas sebuah dalam rangka perlindungan pada lingkungan hidup serta mampu dilihat pada tindakan serta perilaku setiap perseorangan.

Pendapat Husserl yang dikutip Brauwer (1986) pada (Neolaka, 2008) mengidentifikasi apabila kesadaran merupakan pemikiran secara sadar atau pengetahuan yang dapat mengatur akal, hidup sebagai perwujudan dari kesadaran, substansi pada sikap hingga tingkah laku yang direalisasikan pada gejala pada alam serta perlu diidentifikasi berkaitan pada konsepsi sebab akibat. Tingkah laku pikiran tersebut mampu memberikan gubahan jiwa agar mampu menentu pemilihan, seperti memilih hal baik dan buruk dan sebagainya.

Mengacu pada kajian Joseph Murphy (1988) dalam (Neolaka, 2008), kesadaran merupakan proses siuman pada aktivitas perilakunya yakni pemikiran secara sadar yang mampu memberikan peraturan pada akal serta mampu menentukan pemilihan pada apa yang diharapkan seperti baik buruk, positif negatif, dan lain sebagainya. Kajian Poedjawijatna (1986) dalam (Neolaka, 2008), menganalisis apabila kesadaran merupakan tingkat kesadaran berkaitan pada khazanah keilmuan yakni pengetahuan mengenai tergugahnya jiwa pada sebuah hal, kesadaran hingga tahu itu sama.

Kajian dari Buletin Para Navigator (1988) dalam (Neolaka, 2008), diidentifikasi apabila kesadaran merupakan modal pokok individu yang akan mengalami kemajuan dalam kehidupan mereka. Dalam garis besarnya, kesadaran tersebut mampu dikalkulasikan pada beragam aspek, yakni; keterampilan dalam membuka mata hingga memberikan penafsiran terhadap apa yang mereka amati, keterampilan pada kegiatan serta keterampilan dalam hal berbicara. Apabila individu dapat melaksanakan beragam aspek tersebut dengan terintegrasi, sehingga mereka yang dikatakan sebagai individu dengan kesadaran penuh.

Pengertian lingkungan berdasarkan pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta (1976) dalam (Neolaka, 2008), merupakan suatu kata pembentukan dari kata dasar “lingkung” yang bermakna sekeliling. Lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melindungi atau melingkari suatu wilayah di sekitarnya. Merujuk pada Ensiklopedia Umum (1977) lingkungan didefinisikan sebagai alam sekitar yang berkaitan pada individu dalam kehidupan pergaulan yang dipengaruhi oleh individu sebagai persona masyarakat pada kehidupan serta kebudayaan.

Ensiklopedia Indonesia (1983) dalam (Neolaka, 2008), diartikan apabila lingkungan merupakan suatu yang terdapat pada sebuah organisme, yang terdiri atas (1) lingkungan mati atau abiotik yakni lingkungan yang berada pada sebuah organisme yang tersusun atas benda dan faktor alamiah yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya, (2) lingkungan hidup (biotik), yaitu lingkungan di luar suatu organisme.

Kesadaran lingkungan bersumber pada pendapat M.T. Zen (1985) dalam (Neolaka, 2008) ialah suatu pengupayaan yang mengikutsertakan masyarakat negara pada proses penumbuhan serta pembinaan kesadaran agar dapat melestarikan lingkungan mereka berkaitan pada penataan nilai, yakni tata nilai pada lingkungan tersebut melalui filsafat kehidupan dengan kedamaian pada alam dan lingkungan mereka. Asas tersebut perlu dilakukan dengan adanya pendidikan sekolah atau luar sekolah yang diawali pada sekolah kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Mengacu pada pendapat Emil Salim (1982) dalam (Neolaka, 2008) , kesadaran lingkungan merupakan pengupayaan agar mengembangkan kesadaran supaya tidak paham mengenai pengolahan sampah, pencemaran, penghijauan hingga perlindungan terhadap satwa langka, namun lebih pada itu semua mampu membangkitkan kesadaran lingkungan masyarakat Individu secara spesifik pada para generasi muda supaya lebih menyayangi tanah air mereka dalam rangka pembangunan.

Apabila kesadaran lingkungan tersebut mampu memberikan dorongan individu supaya hidup sejalan pada kelestarian alam sehingga mampu menghadirkan perasaan religiositas serta kecintaan kepada kasih Tuhan Yang Maha Esa yang telah tertulis dalam goresan alam serta isi bumi. Kemudian kajian dari Daniel Chiras (1985 dan 1991) dalam (Neolaka, 2008) mengidentifikasi apabila landasan pada sebab kesadaran lingkungan salah satunya ialah etika individu terhadap lingkungan. Etika lingkungan yang sampai sekarang berlaku adalah etika lingkungan yang didasarkan pada sistem nilai yang mendudukan manusia bukan bagian dari alam, tetapi manusia sebagai penakluk dan pengatur alam.

Sistem nilai tersebut muncul pada sifat landasan individu sebagai makhluk biologis. Masing-masing makhluk biologis memiliki landasan sifat sebagai “*biological imperialism*”, sifat yang hendak makan agar dapat hidup untuk diri mereka sendiri serta untuk semua keturunannya. Sikap yang menyatakan apabila seluruh hal yang ada di Bumi merupakan ditujukan untuk diri mereka serta keturunan mereka, yang mana tumbuh menjadi sikap “*anthropocentric*”, semuanya berpusat pada diri sendiri.

## 2.6.2. Faktor yang mempengaruhi Kesadaran Lingkungan

Kesadaran lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

### 1. Faktor Ketidaktahuan

Merujuk pada Suriasumantri (1987) dalam (Neolaka, 2008) , pengetahuan diawali atas perasaan keingintahuan yang tinggi. Dengan demikian, rasa keingintahuan tersebut sebagai media agar melakukan pengumpulan khazanah keilmuan sebanyak-banyaknya. Dalam kajian ilmu teori kesadaran Husserl mengatakan apabila kesadaran merupakan buah pemikiran secara sadar. Poedjawijatna mengidentifikasikan apabila sadar serta keingintahuan ialah substansi yang serupa. Oleh karena itu, jika berbicara mengenai ketidaktahuan sehingga substansi tersebut merujuk pada ketidaksadaran.

Manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam interaksinya, manusia mempengaruhi lingkungan hidup, dan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Sebagai contoh di Indonesia yaitu diisyaratkan supaya melakukan pemeliharaan suatu Daerah Aliran Sungai atau DAS, tetapi dalam realisasinya DAS mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan kerusakan pada sungai, pencemaran lingkungan berupa penumpukan sampah yang dibuang ke sungai. Tercemarnya aliran sungai terjadi di Teluk Jakarta, Surabaya hingga wilayah pantai lainnya sebab adanya pembuangan limbah industrialis.

Anjuran memelihara hutan, kenyataan hutan gundul. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia tidak tahu tentang lingkungan hidup. Berbicara

tentang lingkungan hidup indah namun kenyataannya berlainan. Oleh karena itu faktor ketidaktahuan menjadi faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan.

## 2. Faktor Kemiskinan

Permasalahan lingkungan hidup muncul diakibatkan adanya kesenjangan di antara total keseluruhan masyarakat yang masif serta SDA yang makin minim (Emil Salim, 1985) dalam (Neolaka, 2008). Pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat pesat menjadi 281 juta jiwa. Penduduk yang miskin 25.22 juta jiwa (BPS, 2024). Jumlah penduduk yang besar dan juga jumlah orang miskin yang cukup tinggi akan mengakibatkan penurunan mutu masyarakat, yang mana adanya penekanan pada lingkungan hidup serta SDA yang makin tinggi.

Merujuk pada kajian Ismail Arianto, dkk (1988) dalam buku: *Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, yang dikutip dalam (Neolaka, 2008) , mengidentifikasi apabila kemiskinan ialah permasalahan yang sangat memberikan pengaruh pada munculnya permasalahan sosial lainnya. Masalah sosial ialah sebuah kondisi yang menjelma yang mana masyarakat merasakan adanya suatu pengancaman yang berkaitan pada kepentingan banyak individu. Permasalahan sosial muncul diakibatkan adanya bencana alam, hingga adanya peperangan di dalam dan luar negeri. Berkembangnya permasalahan sosial yang dirasakan oleh masyarakat akan menghasilkan aspek positif pada munculnya perubahan sosial yang diinginkan mampu menghasilkan kemajuan.

## 3. Faktor Kemanusiaan

Kajian Soedjiran Reksosoedarmo (1985) dan kawan-kawan dalam bukunya : pengantar ekologi yang dikutip dalam (Neolaka, 2008) mengidentifikasi

apabila manusia ialah suatu makhluk hidup sebab manusia melakukan suatu interaksi dengan lingkungan sekitar. Manusia mampu memberikan pengaruh pada lingkungan hidup mereka, yang mana mampu mengusahakan SDA lingkungan mereka agar mempertahankan keturunan mereka serta sebaliknya manusia juga dipengaruhi pada lingkungan tempat tinggal mereka. Manusia sejalan dengan lingkungan hidup secara bersamaan serta dinyatakan sebagai suatu ekosistem.

Di dalam kesatuan ekosistem, kedudukan manusia adalah sebagai bagian dari unsur-unsur lain yang tidak mungkin terpisahkan. Karena itu seperti organisme lain, kelangsungan hidup manusia tergantung pula pada kelestarian ekosistemnya. Untuk menjaga terjaminnya kelestarian ekosistem, faktor manusia adalah sangat dominan. Manusia harus dapat menjaga keserasian hubungan timbal-balik antara manusia dengan lingkungannya, sehingga keseimbangan ekosistem tidak terganggu.

#### 4. Faktor Gaya Hidup

Gaya hidup mewah mengedepankan kepentingan material, bersenang-senang, hingga memiliki keinginan dalam suatu mode paling mutakhir telah mengalami penyebaran hingga ke lingkungan pedesaan. Hal ini mampu memberikan pengaruh hingga memberikan kerugian pada lingkungan hidup. Terdapat beragam *lifestyle* pada masyarakat yang mampu memperparah kerusakan lingkungan, antara lain (1) hedonisme; (2) materialisme, (3) konsumerisme, (4) sekularisme, serta (5) individualisme.

### 2.7. Penelitian Sebelumnya

Kajian sebelumnya tersebut merupakan sebuah referensi dan titik acuan peneliti ketika melaksanakan suatu kajian supaya lebih mendalami teori dan metodologi yang difungsikan. Peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu dengan judul yang sama dengan penelitian penulis saat ini. Akan tetapi, penulis menyertakan beberapa penelitian sebagai acuan untuk melengkapi informasi penelitian dalam penelitian penulis. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dinyatakan pada berbagai jurnal ilmiah berhubungan pada topik kajian peneliti, antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Komponen	Keterangan
1.	Nama Penulis	Anis Nurul Khoirunnisa & Hesty Puspita Sari
	Judul Artikel	Peran Bank Sampah Sempu Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Pasir Gombang Kabupaten Bekasi
	Nama Jurnal	Jurnal Al-Fatih Global Mulia
	Metode	Kualitatif (Deskriptif)
	Hasil	Pengelolaan Bank Sampah Sempu hampir sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun tidak menerapkan sistem bagi hasil dan tidak memberikan upah bagi pengelola. Bank Sampah Sempu berhasil meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program menabung dan membuat kerajinan dari bahan bekas. Selain memberikan dampak positif terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, kegiatan sosial ini juga membantu masyarakat yang terdampak bencana.
	URL	<a href="https://doi.org/10.59729/alfatih.v3i1.37">https://doi.org/10.59729/alfatih.v3i1.37</a>
2.	Nama Penulis	Indry Stefany & Isna Rahmawati
	Judul Artikel	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Maju Selalu Kelurahan Marunda Jakarta Utara
	Nama Jurnal	Jurnal Al-Ijtimaaiyyah
	Metode	Kualitatif (Deskriptif)

	Hasil	Strategi pemberdayaan masyarakat RW 05 Kelurahan Marunda melalui Bank Sampah Maju Selalu meliputi pembentukan kelompok, pendampingan, dan perencanaan kegiatan sesuai teori Moeljarto. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, mengurangi sampah berserakan, dan memberikan manfaat ekonomi melalui tabungan nasabah. Partisipasi aktif didorong oleh sosialisasi, transparansi, dan asas gotong royong. Bank sampah berhasil mengubah pandangan masyarakat terhadap manfaat sampah, meningkatkan pendapatan, dan mendukung kemandirian dalam pemilahan sampah.
	URL	<a href="http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i2">http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i2</a>
3.	Nama Penulis	Tedi
	Judul Artikel	Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengelolaan Bank Sampah Saraswati Cipete Utara
	Nama Jurnal	Jurnal Masyarakat Madani
	Metode	Kualitatif (Deskriptif)
	Hasil	Pemberdayaan perempuan melalui Bank Sampah Saraswati RW 07 Cipete Utara berjalan dengan baik sesuai tahapan teori, dengan partisipasi aktif meskipun terkendala lahan dan waktu. Manfaatnya antara lain pendapatan tambahan, pelatihan keterampilan, dan penurunan kasus demam berdarah. Strategi pemberdayaan mendukung akses, partisipasi, dan manfaat ekonomi perempuan, serta mendapat perlindungan dari pemerintah daerah.
	URL	<a href="http://dx.doi.org/10.24014/jmm.v5i2.10953">http://dx.doi.org/10.24014/jmm.v5i2.10953</a>
4.	Nama Penulis	Kusuma Wardany, Reni Permata Sari & Erni Mariana
	Judul Artikel	Sosialisasi Pendirian “Bank Sampah” Bagi Peningkatan Pendapatan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Margasari
	Nama Jurnal	Jurnal Dinamisia Pengabdian Masyarakat
	Metode	Kualitatif (Partisipatif)
	Hasil	Kegiatan ini mengembangkan bank sampah dengan metode partisipatif-emosipatif melalui edukasi, dialog, dan kerja sama multipihak. Masyarakat diajak untuk mengumpulkan sampah untuk dijual, dilatih dalam pengelolaan keuangan sederhana, dan berpartisipasi aktif. Program ini berdampak positif terhadap lingkungan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi warga.
	URL	<a href="https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.4348">https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.4348</a>
5.	Nama Penulis	Siti Nur Azizah Azizah & Indah Rohyani

	Judul Artikel	Rintisan Pembentukan Bank Sampah “Manfangati” Sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen
	Nama Jurnal	Journal of Community Service and Empowerment
	Metode	Kualitatif (Partisipatif)
	Hasil	Sosialisasi Bank Sampah "Manfangati" di Desa Songging, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen berlangsung sukses dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, baik sampah organik maupun anorganik. Masyarakat, termasuk anggota PKK, LPMD, BPD, serta ketua RT dan RW, antusias mengikuti acara ini dan belajar bagaimana sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomis. Sosialisasi ini juga mengingatkan pentingnya tidak membuang sampah sembarangan untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan dan bencana alam.
	URL	<a href="https://doi.org/10.32639/jcse.v3i1.73">https://doi.org/10.32639/jcse.v3i1.73</a>
6.	Nama Penulis	Hamdani Sumantri, Yunindyawati Yunindyawati & Zulfikri Suleman
	Judul Artikel	Proses Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga oleh Bank Sampah “Kebumen Gemilang Sejahtera” di Kelurahan II Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.
	Nama Jurnal	Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora
	Metode	kualitatif (Deskriptif analitik)
	Hasil	Penelitian ini mengkaji tentang pemberdayaan perempuan, khususnya ibu rumah tangga, melalui pengelolaan sampah daur ulang di Kelurahan II Ilir dengan fokus pada Bank Sampah KGS. Proses pemberdayaan yang meliputi pemberdayaan, penguatan, perlindungan, dukungan, dan pemeliharaan telah berhasil meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan inovasi ibu rumah tangga dalam mengelola sampah. Program ini juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.
	URL	<a href="https://doi.org/10.59729/alfatih.v3i1.37">https://doi.org/10.59729/alfatih.v3i1.37</a>
7.	Nama Penulis	Fauzan, Reza Alfiatur Rosida, & Reza Fatimatus Salwa
	Judul Artikel	Peran Program Bank Sampah dan Jelantah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk Mewujudkan Tujuan SDGs di Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) RIZKI Jember.

	Nama Jurnal	Jurnal Dinamisia Pengabdian Masyarakat
	Metode	Kualitatif (Deskriptif)
	Hasil	Bank Sampah dan Minyak Jelantah bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat melalui pengelolaan sampah dan limbah minyak jelantah. Program ini berdampak positif terhadap lingkungan, dengan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sosial, dengan meningkatkan keakraban antar warga, dan ekonomi, dengan memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat. Evaluasi menunjukkan kemajuan yang signifikan, membantu perekonomian meskipun belum mencukupi kebutuhan dasar, dan mendukung pencapaian tujuan SDGs.
	URL	<a href="https://doi.org/10.54082/jipm.73">https://doi.org/10.54082/jipm.73</a>
8.	Nama Penulis	Fadilah Nur Amaliah
	Judul Artikel	Peran Pengelola Bank Sampah Ramah Lingkungan (Ramli) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Perumahan Graha Indah Kota Samarinda
	Nama Jurnal	Jurnal CSR, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat
	Metode	Kualitatif (Deskriptif)
	Hasil	Peran pengelolaan Bank Sampah RAMLI dalam pemberdayaan masyarakat antara lain adalah meningkatkan kesadaran dan kemandirian. Pengelola berfokus pada proses penyadaran agar masyarakat mau berubah ke arah yang lebih baik. Selain itu, pengelola juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sampah yang dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri.
	URL	<a href="https://doi.org/10.30872/ls.v1i2.430">https://doi.org/10.30872/ls.v1i2.430</a>
9.	Nama Penulis	Ani Yusmitasari, Andri Juniarta, Dewi Arifita Sari, Diky Bustomy, Nadya Jihana Putri, Nurul Rusita Sari, Prasya Tsaqof Vendra, & Riyan Erwin Hidayat
	Judul Artikel	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Akan Kebersihan Lingkungan Melalui Bank Sampah Organik Dan Anorganik.
	Nama Jurnal	Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan
	Metode	Kualitatif (Partisipatif)
	Hasil	Program pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah organik dan anorganik telah berhasil meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, mengurangi volume sampah yang dibuang ke

		tempat pembuangan akhir (TPA), meningkatkan keterampilan pengolahan sampah menjadi kompos, meningkatkan kualitas lingkungan, membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta menciptakan model pengelolaan berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
	URL	<a href="https://doi.org/10.62383/aksinyata.v1i4.673">https://doi.org/10.62383/aksinyata.v1i4.673</a>
10.	Nama Penulis	Vina Liyana Sofyan & Solfema
	Judul Artikel	Bank Sampah Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah Pancadaya Kecamatan Kuranji Kota Padang)
	Nama Jurnal	Jurnal Family Education
	Metode	Kualitatif (Deskriptif)
	Hasil	Studi ini menunjukkan bahwa Bank Sampah Pancadaya telah berhasil memberdayakan masyarakat melalui program sosialisasi, edukasi, dan ekonomi sirkular, yang tidak hanya meningkatkan keterampilan dan kesadaran mengenai pengelolaan sampah, tetapi juga menghasilkan pendapatan tambahan, meningkatkan kebersihan lingkungan, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.
	URL	<a href="https://doi.org/10.24036/jfe.v4i3.202">https://doi.org/10.24036/jfe.v4i3.202</a>